RENCANA KERJA

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kotak Pos 40 Sungai Penuh 37101 Jambi
Telepon (0748) 22250 Faximil 22300 Email bbtnks@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

NOMOR: SK. 240/T.1/BTU/REN/12/2023

TENTANG
RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
TAHUN 2024

KEPALA BALAI BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Amar Kedua Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.217/KSDAE/SET.3/REN.2/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ SET.1/6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK /SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
15. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT TAHUN 2024.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai Besar ini;
KEDUA	:	Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja lingkup Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA BALAI BESAR,

Haidir, S.Hut., M.Si
NIP. 19730729 199803 1 002

Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang DikembangkanLAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Nomor: SK. 240/T.1/BTU/REN/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan yang lebih berdaya dan berhasil guna, maka disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem. Selanjutnya Renja ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Balai Besar TNKS tahun 2024.

Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Besar TNKS, kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui proses pembahasan internal Balai Besar TNKS.

Dokumen Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya- upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan pelaporan, serta sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan instansi terkait.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2024 kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Sungai Penuh, 27 Desember 2024
Kepala Balai Besar,

Haidir, S.Hut., M.Si.
NIP. 197307291998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

RINGKASAN EKSEKUTIF **1**

BAB I PENDAHULUAN **4**

A. Latar Belakang 4

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi 6

C. Struktur Organisasi dan SDM 7

BAB II CAPAIAN KINERJA 2022 DAN PROGNOSIS 2023 ..... **11**

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 11

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 16

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024 ..... **20**

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional 20

B. Indikator Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 23

1. Perencanaan Kawasan Konservasi 25
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 26
3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 28
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 29
5. Pemulihan Ekosistem 30
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 30

BAB IV P E N U T U P **32**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023 9

Tabel 2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022..... 16

Tabel 3 Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023 18

Tabel 4 Prioritas Nasional yang didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 22

Tabel 5 Program dan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2024 24

Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan Target IKK 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 8

Gambar 2. Struktur Pegawai berdasarkan jenis kelamin 9

Gambar 3. Kondisi Pegawai Balai Besar TNKS berdasarkan Tingkat Pendidikan 9

Gambar 4. Statistik Pegawai Berdasarkan Usia per Desember 2022 10

Gambar 5. Struktur pegawwai berdasarkan jabaran dan tingkat pendidikan 10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai salah satu kawasan konservasi terluas di Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat tinggi dan beragam. Kawasan TNKS juga memiliki berbagai objek data tarik wisata alam yang potensial untuk dikembangkan antara lain gunung, bukit, danau, dan air terjun. Hampir seluruh kawasan TNKS merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) sehingga keberadaan dan kelestariannya semakin hari kian terasa penting. Namun sebagaimana kondisi kawasan konservasi di Indonesia pada umumnya, dalam pelaksanaan pengelolaannya, TNKS masih menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, seperti *illegal logging*, perambahan, perburuan liar, penambangan liar, dan pembangunan jalan dalam kawasan.

Sebagai upaya menghadapi berbagai ancaman dan gangguan tersebut, pengelolaan TNKS diarahkan tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar *(wildlife protection)*, namun saat ini TNKS juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi *(conservation for community welfare),* restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi budaya.

Penetapan Renja Balai Besar TNKS Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Sasaran yang ingin dicapai pada Renja 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai melalui perjanjian kinerja Kepala Balai Besar TNKS dengan Dirjen KSDAE. IKK Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat adalah sebagai berikut (1) Nilai SAKIP pada Ditjen KSDAE, (2) Level maturitas SPIP, (3) Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel, (4) Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif, (5) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi, (6) Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi, (7) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, (8) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi, (9) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam, (10) Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya, (11) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya, (12) Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, (13) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran, (14) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif, (15) Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL, (16) Jumlah penyelamatan satwa liar, (17) Jumlah destinasi wisata alam prioritas, (18) Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon, (19) Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air, (20) Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*, (21) Luas ekosistem yang dipulihkan

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat pada Tahun 2024, sebagaimana pagu alokasi anggaran tahun 2024 berdasarkan pagu definitif sebesar Rp34.986.320.000 (Tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh rupiah). Alokasi anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjungan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara. TNKS sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Besar TNKS antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan tersebut diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, serta peran hutan di dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan didalam sistem penyangga kehidupan.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program-program kegiatan Balai Besar TNKS di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Program-program kegiatan Balai Besar TNKS yang diharapkan mampu untuk mempertahankan keutuhan dan kelestarian kawasan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan dengan menyusun program dan rencana kerja yang yang berkelanjutan.

Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Balai Besar TNKS Tahun 2024. Renja ini disusun dengan mengacu Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024 yang berpedoman pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Balai Besar TNKS Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renja Balai Besar TNKS Tahun 2024 disusun sebagai kerangka kerja yang komprehensif, terintegrasi dan terarah berupa program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaanya. Sasaran penyusunan Rencana kerja TNKS Tahun 2024 adalah terwujudnya acuan formal bagi penyelenggaraan pengelolaan TNKS dalam jangka pendek/ tahunan dan ruang lingkup Renja Balai Besar TNKS Tahun 2024 dilakukan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai keluaran *(output)* dan indikator keberhasilan (*outcome*) yang telah ditetapkan anggaran pelaksanaanya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Kedudukan

Balai Besar TNKS adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar TNKS dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar setingkat eselon II-b pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantor Balai Besar TNKS berkedudukan di Kotamadya Sungai Penuh, Propinsi Jambi dengan 3 (tiga) Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) yaitu BPTN Wilayah I Jambi di Bangko, BPTN Wilayah II Sumatera Barat di Padang, dan BPTN Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan di Curup. Dari ketiga BPTN tersebut dibantu oleh 6 (enam) Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah, yaitu:

1. SPTN Wilayah I Kerinci di Sungai Penuh;
2. SPTN Wilayah II Bungo di Muara Bungo;
3. SPTN Wilayah III Pesisir Selatan di Painan;
4. SPTN Wilayah IV Solok Selatan di Sangir;
5. SPTN Wilayah V Lubuklinggau di Kota Lubuklinggau;
6. SPTN Wilayah VI Rejang Lebong di Rejang Lebong.

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Besar TNKS bertugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Balai Besar TNKS juga

melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
11. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan taman nasional, secara struktur organisasi terdapat pengembangan penyempurnaan organisasi dan tata kerja unit pelaksana taman nasional. Balai Besar TNKS dikembangkan menjadi Balai Besar Taman Nasional Tipe A dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha,
b. Bidang Teknis Konservasi,

c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah, yang terdiri dari 3 BPTN wilayah, yaitu: BPTN Wilayah I Jambi dengan 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Kerinci dan SPTN Wilayah II Bungo, BPTN wilayah II Sumatra Barat yang terdiri dari SPTN Wilayah III Painan dan SPTN Wilayah IV Sangir, dan BPTN wilayah III Bengkulu-Sumsel yang terdiri dari SPTN Wilayah V Lubuklinggau dan SPTN Wilayah VI Argamakmur.
d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya Masyarakat, Pranata Komputer dan Anasils SDM Aparatur.

Bagan struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 22 sebagaimana gambar 1.

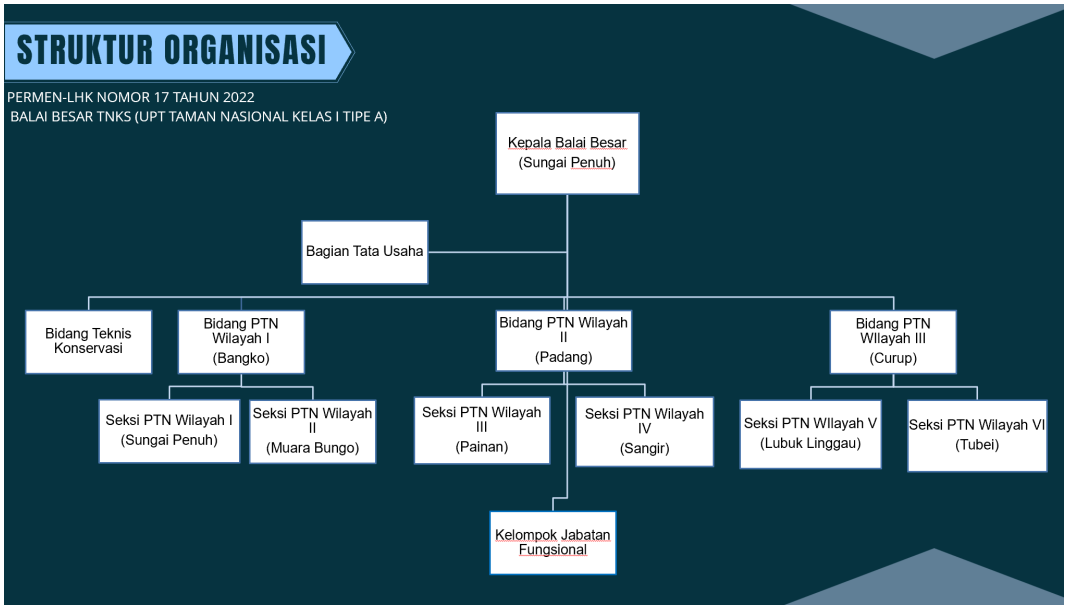

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Jumlah ASN lingkup Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat berjumlah 143 Orang yang terdiri dari 136 orang PNS dan 7 orang PPPK. ASN pada masing-masing jenis jabatan selama periode Desember 2023 tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Struktural	9
2	Fungsional Umum	19
3	Fungsional Khusus	
	a. Polisi Kehutanan	72
	b. Penyuluh Kehutanan	12
	c. Pengendali Ekosistem Hutan	23
	d. Penggerak Swadaya Masyarakat	1
	e. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	5
	f. Pranata Komputer	1
	g. Perencana	1
	Total	**143**

Dengan perbandingan jenis kelamin Laki-laki sejumlah 85 % dan Permpuan sejumlah 15 %, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut

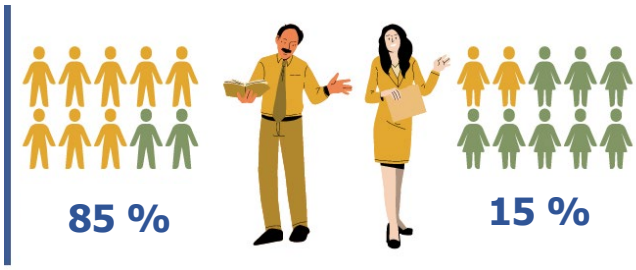

Gambar 2. Struktur Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pada tahun 2023, struktur pegawai menurut tingkat/ jenis pendidikannya dan penempatan pegawai sebagaimana disajaikan dalam gambar berikut.

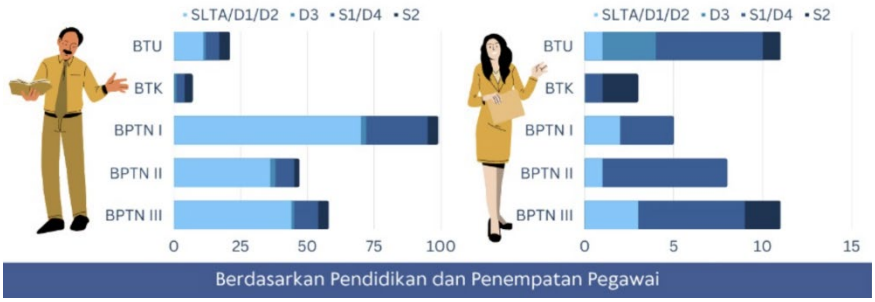

Gambar 3. Kondisi Pegawai Balai Besar TNKS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur pegawai menurut umur yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebanyak 9%. Gambaran lengkap terkait kondisi kepegawaian disajikan pada Gambar 3 berikut.

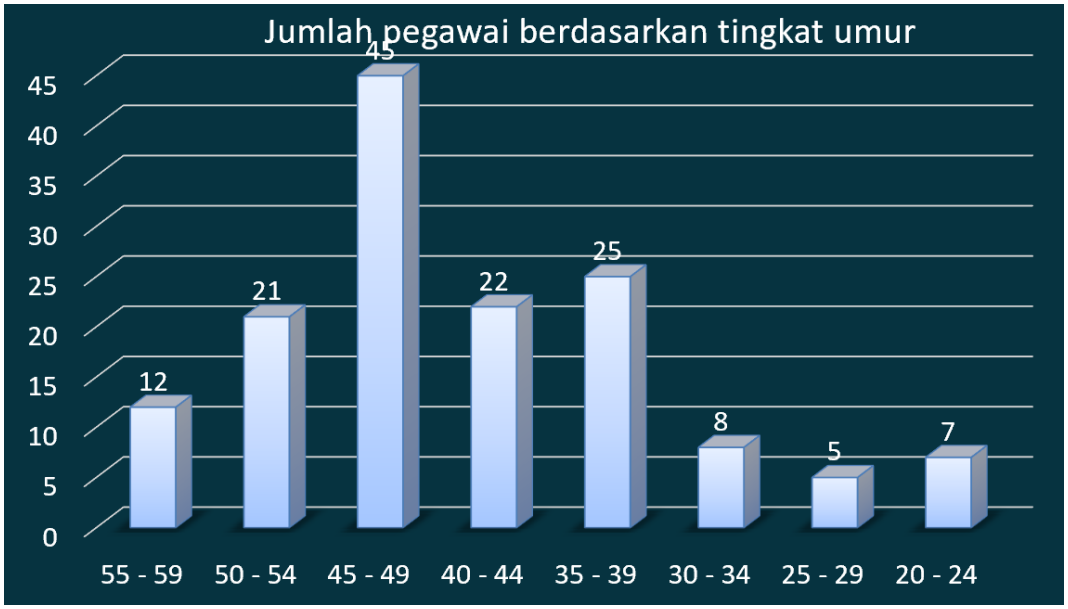

Gambar 4. Statistik Pegawai Berdasarkan Usia per Desember 2023

Sementara berdasarkan jabatan dan tingkat pendidika sebagaimana disajaikan dalam gambar berikut :

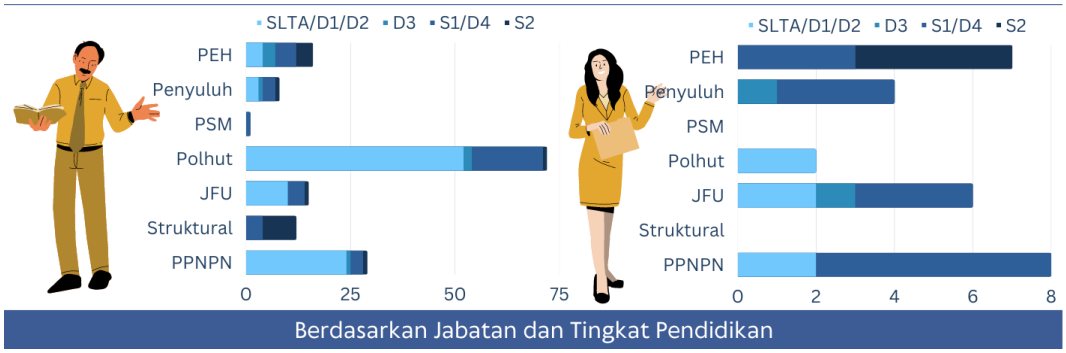

Gambar 5. Struktur pegawai berdasarkan jabaran dan tingkat pendidikan

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Capaian kinerja program berdasarkan masing-masing indikator kinerja program (IKP), disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Balai Besar TNKS

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sendiri berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022 adalah 79,12 atau 101,435% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang mendukung capaian output ini pada tahun 2022 adalah penyusunan rencana kerja, laporan kinerja, rencana operasional dan perjanjian kinerja, revisi rencana strategis Balai Besar TNKS 2020-2024. Sedangkan pada tahun 2023, prognosis nilai SAKIP sebesar 79,88. Angka ini melebihi target yang dibebankan pada tahun 2023 yaitu sebesar 79,5.

2. Level maturitas SPIP

Pada tahun 2022 Nilai maturitas SPIP Ditjen KSDAE hasil penilaian maturitas adalah berada pada level 3 (100%). Nilai ini menjunjukkan bahwa SPIP Ditjen KSDAE masih berada pada level terdefinisi, yaitu SPIP telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kegiatan pendukung capaian output ini adalah penyelenggaraan SPIP dan pembuatan grand design SPIP. Prognosis tahun 2023 maturitas sebesar SPIP 3,5 dengan indeks manajemen risiko 3,5 dan indeks efektivitas pencegahan korupsi 2,814.

3. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel

Indikator kinerja kegiatan ketiga dari sasaran ini adalah opini WTP terhadap laporan keuangan Ditjen KSDAE. Indikator tercapai pada tahun 2022 dan 2023 dengan kegiatan yang telah terlaksana sebagai pendukung capaian output ini adalah penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN).

4. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif

Capaian IKK dari sasaran ini pada tahun 2022 sebesar 39.762,767 ha atau 150%. Kegiatan utama pendukung capaian output kegiatan ini adalah kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar (rangkong, Amorphophallus, dan Rafflesia), pembuatan plot permanen bunga bangkai dan groundcheck data penutupan lahan. Capaian output pada sasaran ini juga didukung oleh kegiatan-kegiatan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang terdapat pada output lain seperti HLN-Forest Programme II, HLN-BioCF dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 54.000 hektar, sementara capaian output pada tahun 2023 sebesar 40762,07.

5. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi

Pada tahun 2023, indikator kinerja yang ditargetkan sebanyak 1 unit KK dengan capaian Balai Besar TNKS sebnyak 1 unit KK.

6. Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi

Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 2 dokumen berupa perjanjian kerja sama dengan PT. XL Axiata dan PT. SEML. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen.

7. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Dari target 45 (empat puluh lima) Desa pada tahun 2022, Balai Besar TNKS mampu memenuhi target 65 (enam puluh lima) desa yang menjalin kesepakatan konservasi dengan Balai Besar TNKS. Bantuan pemberdayaan masyarakat yang diberikan pada tahun 2023 sebanyak 24 kelompok dari target 25 kelompok. Capaian kumulatif KKD sebanyak 82 dari target kumulatif tahun 2023 78 KKD. Pencapaian IKK pada sasaran ini selain berasal dari sumber dana APBN juga di dukung oleh sumber dana HLN-FP

II dan HLN BioCF ISFL serta dari kerjasama dengan pihak ketiga seperti PT. Dempo Sumber Energi.

8. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi

Pada tahun 2023 tidak ada PKS pemberian akses baru yang telah diterbitkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada output ini adalah identifikasi potensi pada zona tradisional/ zona lainnya lingkup BPTN Wilayah II dan Pelatihan/ pendampingan pemetaan partisipatif bersama masyarakat kelompok kemitraan konservasi tingkat Resort lingkup BPTN Wilayah II.

9. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk sasaran kegiatan ini adalah jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam. Pada tahun 2022 total terdapat 48 orang kader konservasi yang dibina berasal dari Sakawanabakti cabang Kerinci dan Rejang Lebong serta Kerinci Birdwatching Club. Pembinaan terhadap Kerinci Birdwatching Club (KBC) ini menggunakan anggaran dari output perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik. Tahun 2023, Jumlah Kader Konservasi yang dibina sebanyak 188 orang, jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 orang.

10. Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya

Capaian tahun 2023 sebanyak 13 kelompok yang terdiri dari 12 Kelompok di Bidang PTN WIlayah III dan 1 Kelompok di Bidang PTN WIlayah I melalui kegiatan pendampingan kelompok kemitraan dan pemberian bantuan usaha ekonomi (KPPL Maju Bersama).

11. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya

Indikator Kinerja Kegiatan pada sasaran ini tercapai 100% pada tahun 2022 dengan output 2 rekomendasi kebijakan berupa peningkatan perlindungan kawasan dan pencegahan kebakaran hutan.

Berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan TNKS tahun 2022, nilai efektivitas pengelolaan mengalami penurunan dari tahun

2021 yaitu dari 79 menjadi 74. Penurunan ini dikarenakan kelemahan pada input, proses dan output pengelolaan, diantaranya tidak tersusunnya Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) TNKS Tahun 2022, kekurangan jumlah SDM baik dari segi jumlah maupun fungsi, pola pengelolaan anggaran yang belum optimal.

Penilaian efektivitas pengelolaan tahun 2023 sebanyak 1 unit KK tercapai dengan nilai METT TNKS tahun 2023 sebesar 76 poin.

12. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi

Total capaian penanganan konflik tenurial Balai Besar TNKS tahun 2022 adalah 111.563,21 ha atau 150% dari target 60.000 ha yang ditetapkan. Output tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi opened area melalui desk study. Area yang telah dipetakan sebagai opened area tersebut kemudian diverifikasi dan dipetakan kembali bersama dengan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2023, capaian penanganan konflik tenurial Balai Besar TNKS adalah 804,16 ha dari target 612 ha.

13. Luas kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif

Dalam rangka meningkatkan luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebagai ruang perlindungan kehati spesies dan genetik tinggi di dalam kawasan konservasi tahun 2022, Balai Besar TNKS mendapatkan target seluas 8.000 ha. Sasaran dari kegiatan ini dikatakan tercapai apabila kegiatan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari mencapai luasan target tersebut dengan verifier berupa peta sebaran spesies dan daftar spesies.

Capaian output dari indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 14.511,6 ha (150%). Kegiatan utama yang mendukung capaian ini adalah monitoring populasi gajah sumatra yang dilakukan di blok air teramang dan blok air rami) yang termasuk dalam wilayah Resor Bengkulu Utara-Mukomuko, Seksi PTN Wilayah VI, Bidang PTN Wilayah III Bengkulu-

Sumatra Selatan, Asian Waterbird Census, inventarisasi invasive spesies, dan inventarisasi rangkong, bunga bangkai dan Rafflesia

Prognosis capaian indikator kinerja di BBTNKS Tahun 2023 adalah 10.954,54 ha dari target IKK sebesar 4,144 ha.

14. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman species genetik dan TSL

Dalam rangka meningkatkan luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebagai ruang perlindungan kehati spesies dan genetik tinggi di dalam kawasan konservasi tahun 2022, Balai Besar TNKS mendapatkan target seluas 8.000 ha. Capaian output dari indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 14.511,6 ha (150%). Pada tahun 2023, capaian output adalah 1 entitas yang sesuai target dengan output Dokumen Kajian Pelepasliaran Satwa.

15. Jumlah destinasi wisata alam prioritas

Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan pada tahun 2022 sebesar 150% atau terdapat tiga destinasi yang dikembangkan melalui penyusunan desain tapak wisata alam dari target 2 destinasi. Sementara pada tahun 2023, capaian IKK sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 destinasi.

16. Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air

IKK ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah fasilitasi permohonan izin air, monitoring izin dan kegiatan analisis potensi kehati di lokasi potensi panas bumi. Target capaian IKK ini adalah pemberian izin pemanfaatan air sebanyak dua entitas yang pada tahun 2022 ini belum dapat dicapai. Pada tahun 2023, jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air yang meiliki target 1 entitas juga tidak tercapai.

17. Luas ekosistem yang dipulihkan

Pada tahun 2022 target pada sasaran ini adalah 700 ha ekosistem yang dipulihkan. Kegiatan pada output ini adalah pemulihan ekosistem dengan penanaman intensif bersama masyarakat, pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam dan pemeliharaan pemulihan ekosistem. Capaian IKK ini

pada tahun 2022 seluas 1023,6 ha (146,23%). Sedangkan pada tahun 2023, capaian IKK yang diperoleh adalah 712,38 ha dari target yang ditetapkan seluas 1051,61 ha.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Realisasi anggaran Balai Besar TNKS pada tahun 2022 adalah 98,21%, realisasi yang paling rendah berada pada output layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada kegiatan layanan umum berupa sisa anggaran pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas yang tidak terserap.

Tabel 2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Kode	Kegiatan/ Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
5423	**Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**				
5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	150.000.000	145.570.430	4.429.570	97,05
5423.RAG.004	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	239.157.000	234.635.167	4.521.833	98,11
6739	**Perencanaan Kawasan Konservasi**				
6739.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan penetapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai efektivitas	103.750.000	103.745.000	5.000	100,00
6739.REA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	281.503.000	280.861.196	641.804	99,77
6740	**Pengelolaan Kawasan Konservasi**				
6740.BDB.004	HLN Forest Programme II Sumatera	6.362.424.000	6.276.935.203	85.488.797	98,66
6740.BDB.005	HLN BioCF-ISFL	3.261.750.000	3.185.513.021	76.236.979	97,66

Kode	Kegiatan/ Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
6740.BDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	40.500.000	40.500.000	0	100,00
6740.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.864.600.000	1..861.608.269	2.991.731	99,84
6740.QDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.682.480.000	1.671.298.055	11.181.945	99,34
6740.REA.002	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	300.000.000	298.629.220	1.370.780	99,54
5741	**Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik**				
5741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	585.635.000	584.936.630	698.370	99,88
6742	**Pemulihan Ekosistem**				
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	695.750.000	695.139.324	610.676	99,91
5419	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**				
5419.EBA.962	Layanan Umum	617.924.000	585.163.110	32.760.890	94,70
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	20.990.505.000	20.547.934.839	442.570.161	97,89
5419.EBB.951	Layanan Sarana Internal	44.000.000	43.922.801	77.199	99,82
5419.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	65.000.000	64.064.000	936.000	98,56
Total		**37.284.978.000**	**36.618.082.384**	**666.895.616**	**98,21**

Dari segi kinerja pelaksanaan anggaran sendiri, pada tahun 2022 Balai Besar TNKS mendapat nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92,05. Sedangkan, secara kinerja anggaran dalam mencapai capaian output Balai Besar TNKS tahun 2022 mendapatkan poin yang cukup tinggi yaitu dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 84,45 (baik).

Pada tahun 2023, prognosis serapan anggaran tertera sebesar 98,81 % seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

KODE	OUTPUT	ALOKASI	REALISASI	% REALISASI
5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	145,000,000	144,757,882	99.83
5423.QAH.002	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	24,500,000	24,370,000	99.47
5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	356,500,000	353,558,648	99.17
5423.RAG.002	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	622,665,000	614,568,606	98.70
6739.AEC.001	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	12,500,000	12,500,000	100.00
6739.PBV.004	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	121,940,000	121,790,400	99.88
6739.REA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	267,250,000	218,873,571	81.90
6740.BDB.004	Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	2,515,230,000	2,469,724,228	98.19
6740.BDB.005	Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	2,857,750,000	2,845,285,258	99.56
6740.PBV.001	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	211,465,000	211,254,753	99.90
6740.PBV.002	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	1,803,750,000	1,773,300,092	98.31
6740.QDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1,588,950,000	1,587,711,225	99.92
6740.QDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	26,250,000	25,925,000	98.76
6740.QDD.001	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	320,000,000	312,127,209	97.54
6740.REA.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	283,800,000	283,783,802	99.99
6740.REA.002	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	90,000,000	89,957,140	99.95
6741.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	100,000,000	95,791,400	95.79
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	427,075,000	424,689,035	99.44
6741.REB.001	Penyelamatan Satwa Liar	359,160,000	357,779,390	99.62

KODE	OUTPUT	ALOKASI	REALISASI	% REALISASI
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	576,695,000	575,685,901	99.83
5419.EBA.962	Layanan Umum	598,500,000	594,390,922	99.31
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	20,986,340,000	20,747,793,666	98.86
JUMLAH		34,295,320,000	33,885,618,128	98.81

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah 1) Menjaga Kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, 2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, KP, dan MP, 3) Menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan pembangunan, dan 4) Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, strategi pelaksanaan fokus pembangunan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi sebanyak 45 Proyek. Keberlanjutan dan penambahan Major Project tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme *Clearing House* dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun delivered.

Dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus secara nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim (PN 6). Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Ditjen KSDAE mendukung peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara, peningkatan pemasaran wisata, dan percepatan kesiapan destinasi khususnya pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) sebagai unit pelaksana teknis lapangan Dirjen KSDAE, pada tahun 2024 Balai Besar TNKS mendapatkan mandat 2 (dua) Prioritas Nasional tersebut untuk dijalankan di tingkat tapak, yaitu:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai berikut:
   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.
   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.
2. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.** mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Ditjen KSDAE, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan peningkatan kualitas lingkungan, sebagai berikut:

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value*/HCV) yang dipertahankan secara nasional; (2) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar; (3) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat.
b. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya.

Tabel 4. Prioritas Nasional yang didukung oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)				
02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	200.000
			Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon	85.000
			Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	50.000
		02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	170.000
			Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	2.162.500
			Unit Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan Kualitas Usahanya	215.000
			Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	162.000
			Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	615.000
			Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani	590.000
			Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	2.600.000
			Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	347.000

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
			Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	17.000
			Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi	100.000
06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembang an 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	600.000
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)				
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	694.550
		05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	600.000
			Penyelamatan Satwa Liar	300.000
			Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	600.000
			Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	100.000

B. Indikator Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan indikator kinerja dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 maka dapat disusun program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan pagu anggaran indikatif Balai Besar TNKS Tahun 2024.

Pagu awal yang diperoleh Balai Besar TNKS Tahun 2024 sebesar Rp33,730,939,000,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi

Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Program dan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2024

Program	*Kegiatan*	*Anggaran (x Rp.1.000)*
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	735.000
	Perencanaan Kawasan Konservasi	317.000
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	7.055.250
	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	500.000
	Pemulihan Ekosistem	694.550
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	22.429.139
Total Pagu Anggaran Tahun 2024		***33,730,939***

Adapun Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari pelaksanaan program yang akan dilaksankan pada tahun 2024 berdasarkan lokasi target kinerja Renstra Balai Besar TNKS 2020-2024, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target IKK

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	78,14 Poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	4 Level
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	54.000 ha
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	1 unit KK
6	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 dokumen
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka	30 desa

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK
	pemberdayaan masyarakat	
8	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	300 ha
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	3 orang
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	13 kelompok
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	1 Unit KK
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	36.426 Hektar
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	1 Unit
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	29.833 Hektar
15	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1 Entitas
16	Jumlah penyelamatan satwa liar	5 Kejadian
17	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1 Entitas
18	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon	1 Entitas
19	Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	1 Entitas
20	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi
21	Luas ekosistem yang dipulihkan	250 Hektar

Terdapat 5 (lima) Kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja tahun 2024 beserta sasaran kegiatan di Balai Besar TNKS yang kemudian dipetakan berdasarkan karakteristik wilayah untuk setiap Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) sesuai dengan prinsip pengelolaan Taman Nasional berdasarkan *Resort Base Management* (RBM) yaitu:

1. Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab pelaksanaan (*monitoring output* dan kesesuaian ketentuan pelaksanaan) kegiatan ini adalah Bidang Teknis Konservasi dengan pelaksana lapangan baik Bidang Teknis Konservasi maupun Bidang

Wilayah dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Nilai Efektivitas. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut:

A. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif pada tahun 2024 dengan target sebesar 54.000 ha. Rincian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a) Inventarisasi tipe ekosistem dan kehati;
   b) Verifikasi Tutupan lahan/ Open Area dan Tipe Ekosistem (On Desk);
   c) Verifikasi tutupan lahan/Opened area dan tipe ekosistem menggunakan drone;
B. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi dengan target 1 unit KK. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 berupa Penyusunan RPJPn Tahun 2025.
C. Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi dengan target 1 dokumen. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pencapaian output ini adalah sebagai berikut:
   a) Monitoring dan evaluasi PKS untuk menunjang data aplikasi SIGMA
   b) Bimbingan Teknis kerja sama kepada mitra

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Teknis Konservasi dengan pelaksana lapangan baik Bidang Teknis Konservasi maupun Bidang Wilayah dengan 2 sasaran yaitu Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi dan Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Adapun indikator dalam kegiatan ini adalah:

A. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 30 Desa.

Rincian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelompok
b) Pendampingan Kelompok Masyarakat
c) Monev Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
d) Verifikasi Kelompok/Desa Calon Penerima Bantuan
e) Pemberian Bantuan usaha ekonomi produktif

B. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi dengan target seluas 300 hektar yang tersebar dalam 3 (tiga) wilayah pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berupa:

a) Pelatihan/ Pendampingan Pemetaan Partisipatif Bersama Masyarakat Kelompok Kemitraan Konservasi
b) Verifikasi Pemohon serta Kelayakan Potensi dan Lokasi

C. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam dengan target 3 orang. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berupa:

a) Peningkatan/ pembinaan kader konservasi
b) Visit to School Visit Dalam Rangka Bina Cinta Alam
c) School Visit Dalam Rangka Bina Cinta Alam
d) Kemah konservasi/ jambore konservasi

D. Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya dengan target 13 kelompok. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berupa:

a) Pendampingan Kelompok Kemitraan Konservasi
b) Monev Kemitraan Konservasi

E. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya dengan target 1 unit KK dan pelaksanaan kegiatan berupa:

a) Penilaian METT
b) Rapat Koordinasi Multipihak dalam Pengelolaan World Heritage Site
c) Pembuatan Brosur dan Leaflet terkait TNKS dan Status

Internasional TNKS

F. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang dengan target seluas **36.462 hektar**. Kegiatan yang akan dilakukan berupa Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Subjek dan Objek Areal Terbangun Dalam Rangka Penanganan Konflik Tenurial,

G. Jumlah Kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran, dengan targer 1 unit dalam tahun 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKK ini adalah:
   a) Smart Patrol Pengamanan Hutan Bersama MMP,
   b) Pelatihan Menembak,
   c) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan,
   d) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan (KPA, Kader Konservasi, Pramuka).

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Teknis Konservasi dengan 3 (tiga) indikator kegiatan yaitu:

A. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan target seluas 29.833 hektar dan pelaksanaan kegiatan berupa:
   a) Monitoring Populasi Harimau Sumatra dan Mangsanya,
   b) Monitoring Gajah Sumatera,
   c) Monitoring Tumbuhan dan Satwa Kunci (Rangkong, Bunga Bangkai dan Rafflesia,
   d) Penyusunan Dokumen Analisa Capaian Inver Kehati Tinggi di TNKS,
   e) Analisis sampel DNA Gajah Sumatera.

B. Jumlah penyelamatan satwa liar sebanyak 5 kejadian dengan kegiatan:
   a) Penanganan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar,
   b) Monitoring Pelepasliaran Satwa,

C. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan target 1 entitas dan pelaksanaan kegiatan berupa Inventarisasi Sebaran Tanaman Obat-obatan.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Teknis Konservasi dengan pelaksana kegiatan baik Bidang Teknis Konservasi maupun Bidang wilayah, sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Sasaran tersebut memiliki 3 indikator yakni :

A. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, dengan output pada tahun 2024 berupa 1 entitas. Rincian pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan adalah :
   a) Kajian keanekaragaman hayati dan ekosistem,
   b) Pembahasan hasil kajian keanekaragaman hayati dan ekosistem
B. Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air dengan terget pada tahun 2024 adalah 1 entitas. Dengan rincian kegiatan yang mendukung capaian IKK ini adalah:
   a) Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air,
   b) Penyusunan Dokumen Usulan Peta Areal Pemanfaatan Air
   c) Monitoring dan Evaluasi IUPA/ IUPEA
C. Jumlah destinasi wisata , science, academic, voluntary, education sdengan target 1 Destinasi. Pelaksanaan kegiatan berupa:
   a) Penyusunan desain tapak
   b) Pemeliharaan Jalur Pendakian Gunung Kerinci Via SolokSelatan.
   c) Pemantauan dan Evakuasi Pengunjung Gunung Kerinci Via Solok Selatan.
   d) Pembuatan Jalur Track Madapi (Tahap I: 200m),
   e) Pemeliharaan Jalur Pendakian Gunung Kerinci,
   f) Pemantauan dan Evakuasi Pengunjung Gunung Kerinci,

g) Pemeliharaan Jalur Pendakian Gunung Tujuh,
h) Pemantauan dan Evakuasi Pengunjung Danau Gunung Tujuh,
i) Pemeliharaan Jalur Wisata Danau Kaco dan Rawa Bento,
j) Pemeliharaan Jalur Pendakian Gunung Masurai,
k) Pembuatan FS dan DED Sarpras Wisata,
l) Pameran Nasional dalam rangka promosi wisata alam berbasis SAVE

5. Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Teknis Konservasi dengan pelaksana kegiatan baik Bidang Teknis Konservasi maupun Bidang wilayah, sasaran meningkatnya pemulihan ekosistem, dengan indikator berupa luas ekosistem yang dipulihkan seluas **250 hektar** pada tahun 2024. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Pemulihan Ekosistem dengan Mekanisme Alam Melalui Pengendalian Jenis Gulma dI BPTNI, BPTN II dan BPTN III Seluas 250 ha.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bagian Tata Usaha dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Balai Besar TNKS. Sasaran tersebut memiliki indikator yakni:

A. Nilai SAKIP Balai Besar TNKS dengan terget output minimal **78,14 poin** pada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan pencapaian terget ini adalah:
   a) Pembayaran gaji dan tunjungan
   b) Operasional dan pemeliharaan kantor
   c) Penyusunan dokumen rencana operasional, rencana kerja, dan petunjuk teknis kegiatan tahun 2024,
   d) Penyusunan laporan kinerja, laporan capaian renja, dan laporan

statistic tahun 2023

e) Pengelolaan data kepegawaian

B. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel dengan target ouput 1 dokumen, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan laporan BMN dan keuangan untuk periode semesteran dan tahunan.

C. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan grans desain SPIP dan penyusunan laporan SPIP secara periodek (Semester dan Tahunan)

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat pada Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024. Renja ini merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar TNKS Tahun 2020-2024. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dan/atau setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024 bagi pelaksana kegiatan, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja BBTNKS Tahun 2024, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari kabinet yang baru akan terbentuk serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2024.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Balai Besar TNKS Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.